

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu upaya negara untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik. Pembangunan merupakan proses yang harus dilaksanakan oleh setiap negara karena adanya globalisasi yang diikuti kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan telah memberikan dampak terhadap perubahan seluruh aspek manusia (Wahyu Dewanto & Rahmawati, 2021). Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi tetapi juga dilihat dari keberhasilan pembangunan manusia (Izzah & Hendarti, 2021). Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek mendasar dalam pembangunan sebuah negara (Nailufar et al., 2024). Berdasarkan laporan *Human Development Report* (HRD) yang dibuat oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), tantangan yang perlu diperhatikan oleh berbagai negara pada abad ke-21 bukan hanya masalah pertumbuhan ekonomi dan kestabilan ekonomi melainkan kualitas pembangunan manusia yang merupakan masalah utama untuk negara berkembang maupun negara maju (Saputra et al., 2021). Untuk mengetahui kualitas pembangunan manusia dalam sebuah negara, dapat dilihat melalui nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan salah satu aspek keberhasilan pembangunan suatu wilayah dengan memprioritaskan manusia sebagai parameter utama. IPM diukur berdasarkan komponen dasar yang membentuk kualitas hidup. Komponen tersebut yaitu pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran (BPS, 2020). UNDP membedakan tingkat IPM berdasarkan empat klasifikasi yakni: rendah ($IPM < 60$), sedang ($60 \leq IPM < 70$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), sangat tinggi ($IPM \geq 80$). Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia dalam suatu wilayah, maka efisiensi dan produktivitas wilayah tersebut semakin tinggi (Iman et al., 2024). Menurut Nailufar et al., (2024), tinggi rendahnya IPM mencerminkan pengaruh kebijakan ekonomi, politik, dan sistem pendidikan

terhadap kualitas hidup dari suatu negara. Hal ini berlaku bagi negara berkembang maupun negara maju.

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki 38 Provinsi dengan masing-masing provinsi memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Realisasi pembangunan di Indonesia mengalami berbagai hambatan seperti tidak meratanya pembangunan yang terjadi di setiap wilayah, beberapa wilayah unggul sementara wilayah lain mengalami ketertinggalan (Wahyu Dewanto & Rahmawati, 2021). Hal ini juga berlaku dalam hal pembangunan manusia antar provinsi. Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional, Kawasan Timur Indonesia (KTI) selalu mendapat perhatian dan prioritas dari pemerintah. Namun, hingga kini pemerataan pembangunan daerah di Kawasan Timur Indonesia masih tertinggal dibandingkan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Berikut data perbandingan Indeks Pembangunan Manusia antara KTI dan KBI:



Gambar 1. 1 IPM Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia (2019-2023)

Sumber: BPS, data dioleh oleh Peneliti

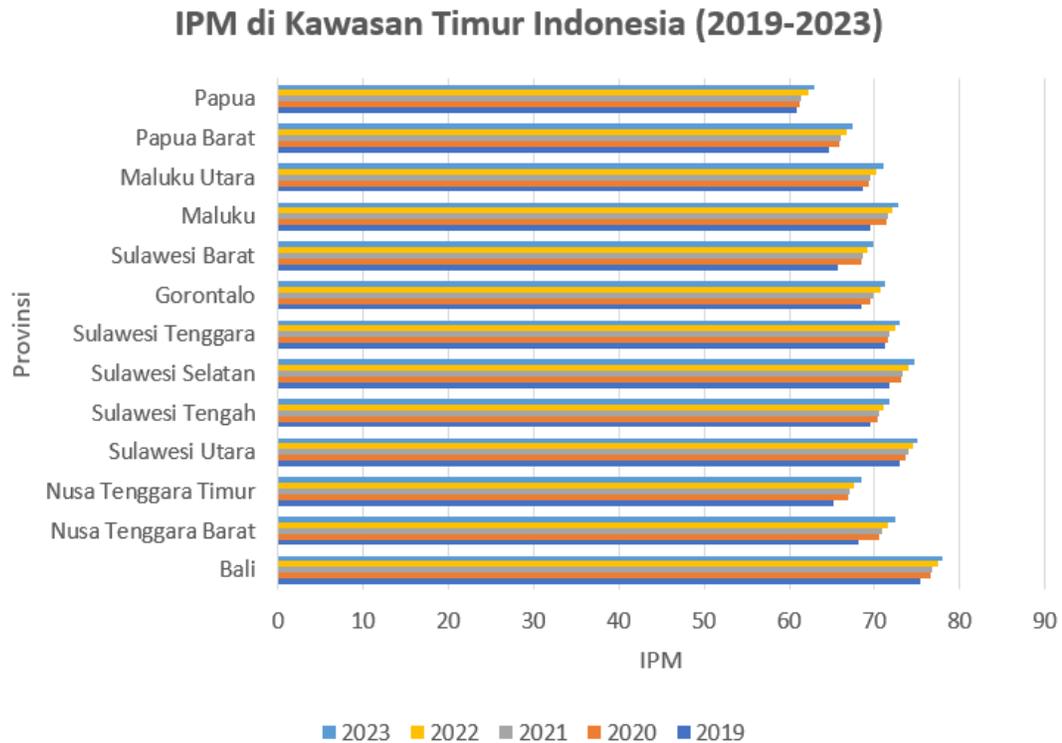
Gambar 1.1 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia terus mengalami peningkatan meskipun

untuk Kawasan Timur Indonesia tetap mengalami ketertinggalan. Hal ini membuktikan bahwa rendahnya IPM di Kawasan Timur Indonesia merupakan sebuah permasalahan yang perlu ditindak lanjuti. Berdasarkan Hipotesa Neo-klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan antarwilayah cenderung meningkat dan apabila proses pembangunan terus berlanjut akan membuat secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan akan menurun. Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan, namun ketimpangan yang terjadi dapat memberikan dorongan kepada daerah terbelakang untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak tertinggal jauh sehingga ketimpangan yang ada dapat memberikan dampak positif (Wahyu Dewanto & Rahmawati, 2021).

Indonesia memiliki 38 provinsi dan provinsi-provinsi tersebut terbagi menjadi Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kawasan Indonesia Timur merupakan kawasan di bagian timur Indonesia yang meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua. Umumnya kedua kawasan tersebut mengalami ketimpangan (Tubaka, 2019). Provinsi-provinsi yang terletak di Kawasan Barat Indonesia (KBI) pada umumnya mengalami perkembangan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan daerah atau provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari perbedaan ketersediaan infrastruktur, sarana transportasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan.

KTI sangat berpotensi menjadi kekuatan ekonomi karena menyimpan berbagai keunggulan untuk diberdayakan antara lain karena ketersediaan sumber daya alam yang melimpah (Rachmaningsih & Priyarsono, 2012). Namun, sumber daya manusia di wilayah ini sangat terbatas secara kuantitas dan kualitas. Akibatnya, sumber daya alamnya sangat berpotensi, tetapi pengolahannya masih sangat minim atau belum optimal. Keberhasilan membangun KTI akan menciptakan kesejahteraan tidak hanya di KTI saja, tetapi juga bagi seluruh bangsa, karena potensi ekonomi di kawasan tersebut terutama di sektor pertanian luar biasa besar. Untuk itu pentingnya peningkatan sumber daya manusia di KTI untuk memaksimalkan potensi yang ada di

KTI untuk pembangunan Nasional. Berikut data IPM di wilayah KTI periode 2019-2023:



Gambar 1. 2 IPM di Kawasan Timur Indonesia (2019-2023)

Sumber: BPS, data diolah oleh Peneliti

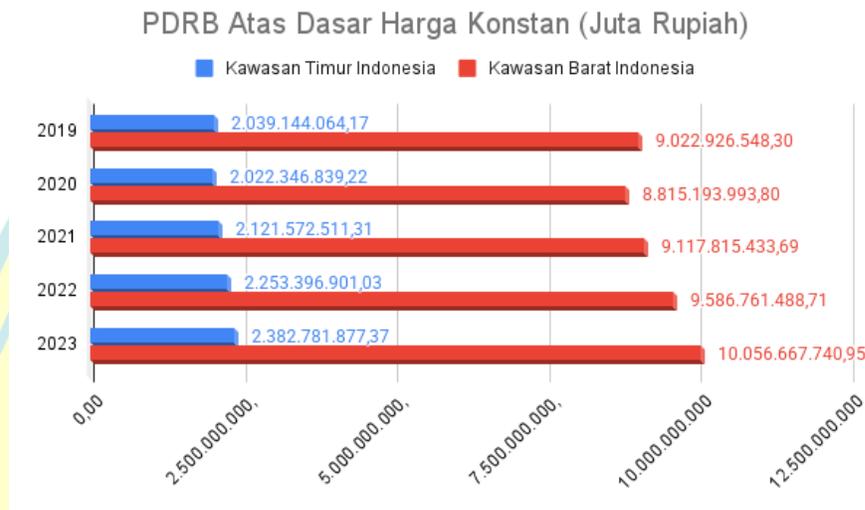
Berdasarkan Gambar 1.2, Bali menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di Kawasan Timur Indonesia. Hal tersebut didorong oleh harapan hidup masyarakat yang tinggi, berkat kualitas layanan kesehatan yang baik dan gaya hidup sehat yang diterapkan oleh penduduknya (Rachmaningsih & Priyarsono, 2012). Selain itu, Bali juga memiliki rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang tinggi. Perekonomian masyarakat yang kuat, terutama didukung sektor pariwisata, usaha mikro, serta budaya kerja yang produktif, turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bali.

Papua menempati posisi terbawah dengan IPM terendah di Kawasan Timur Indonesia. Kurangnya peran pemerintah dalam meningkatkan IPM merupakan salah satu penyebab Papua menempati posisi terbawah (Soeharjoto & Oktavia, 2021). Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia A Widyasanti di Jakarta menyatakan bahwa IPM di Papua rendah karena disebabkan oleh beberapa komponen yang sangat rendah yaitu adalah rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas yang hanya sebesar 4,21 tahun. Artinya kalau 4,21 tahun itu tidak lulus SD sampai dengan mungkin sekitar kelas 4 SD (Ambarwati, 2024).

Nailufar et al., (2024) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia (Studi Kasus 11 Provinsi IPM *Lower Medium*). Penelitian tersebut menyatakan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan IPM yaitu melalui kebijakan penetapan UMP. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Perwithosuci (2024) yang menyebutkan bahwa tinggi rendahnya IPM suatu wilayah atau negara dipengaruhi berbagai faktor salah satunya upah yang diterima masyarakat. Upah minimum yang terus mengalami peningkatan menunjukkan bahwa pemerintah berusaha membuat masyarakat untuk memiliki pendapatan yang wajar. Semakin meningkat upah yang diterima masyarakat, maka IPM juga akan meningkat. Tingginya upah yang diterima masyarakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Selain upah, faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya IPM yang merupakan indikator kesejahteraan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Agus & Yoga, 2024). PDRB menggambarkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu. Ketika suatu daerah mengalami peningkatan PDRB, maka hal tersebut menandakan adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Apabila pendapatan

masyarakat meningkat, maka daya beli masyarakat untuk mencapai kesejahteraan juga akan meningkat (Nailufar et al., 2024).



Gambar 1.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia (2019-2023)

Sumber: BPS, data diolah oleh Peneliti

Berdasarkan Gambar 1.3, PDRB atas dasar harga konstan antara Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia terpaut jauh. Zulham et al., (2017), menyatakan bahwa PDRB berfungsi untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap IPM. Untuk mendukung akses kesejahteraan, pendidikan, dan Kesehatan yang merupakan indikator Indeks Pembangunan Manusia, diperlukan infrastruktur yang memadai. Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam mencapai pembangunan manusia terutama bagi KTI yang menjadi perhatian khusus. Berdasarkan penelitian Iman et al. (2024), faktor yang juga penting untuk meningkatkan IPM suatu daerah adalah teknologi dan informasi. Hal ini karena dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi dapat mendukung pembangunan manusia di berbagai bidang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muhamad & Rahmi, 2023), bahwa faktor yang memengaruhi IPM terdiri dari faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi

meliputi pertumbuhan ekonomi maupun pengeluaran pemerintah sedangkan faktor sosial meliputi kemiskinan, teknologi, dan faktor lainnya.

Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 27,4 Triliun untuk pengembangan dan pemerataan teknologi informasi dan komunikasi (Herman, 2021). Dedy Permadi, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), mengatakan bahwa pemerintah harus memprioritaskan dana untuk teknologi informatika dan komunikasi (TIK) selama era revolusi Industri 4.0. Diharapkan bahwa dana yang dialokasikan ini dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan dan meratakan infrastruktur TIK di seluruh wilayah Indonesia. Ini akan menjadi dasar untuk melaksanakan roadmap Peta Jalan Indonesia Digital 2021–2024. Hal ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan antara wilayah Indonesia barat dan timur.

Teknologi berperan penting dalam hidup manusia. Minimnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan atau beradaptasi dengan teknologi dan informasi dapat menyebabkan rendahnya pembangunan manusia di suatu wilayah (Octaviani, 2022). Teknologi informasi tidak mengenal aspek ruang atau geografis sehingga dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan sumber daya manusia (Saputra et al., 2021). Untuk mengetahui perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di suatu wilayah dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). IP-TIK merupakan ukuran standar yang menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di suatu wilayah pada satu waktu (BPS, 2024).

Menurut oleh Nailufar et al., (2024), upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM sedangkan menurut Izzah & Hendarti (2021), disebutkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Izzah & Hendarti (2021), menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap IPM sedangkan menurut Ilham et al., (2024), PDRB berpengaruh negatif terhadap IPM.

Lalu berdasarkan penelitian Octaviani (2022) Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia sedangkan menurut Muhamad & Rahmi (2023), teknologi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.

Beberapa gap penelitian di atas umumnya menggunakan variabel UMP dan PDRB terhadap IPM. Namun peneliti belum menemukan penelitian yang menggunakan variabel UMP dan PDRB dengan IP-TIK sebagai variabel yang mempengaruhi IPM. Maka untuk pembaruan penelitian, peneliti menambahkan variabel IP-TIK karena variabel ini dianggap penting. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al. (2022) yang menyebutkan bahwa teknologi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan manusia di Indonesia karena teknologi merupakan mediasi krusial yang menjembatani seluruh kegiatan publik. Peneliti menambahkan variabel IP-TIK dengan menggunakan data tahun terbaru yaitu 2019-2023. Wilayah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kawasan Timur Indonesia yang umumnya tertinggal dari Kawasan Barat Indonesia sehingga membutuhkan perhatian khusus baik dari masyarakat maupun pemerintah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto, dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Kawasan Timur Indonesia)”

1.2. Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa IPM di Kawasan Timur Indonesia masih tertinggal dengan Kawasan Barat Indonesia. Hal ini perlu diatasi dengan melihat berbagai faktor yang memengaruhinya. Pembangunan manusia menjadi fokus utama dalam kebijakan nasional. Namun, belum diketahui secara pasti sejauh mana upah minimum, pertumbuhan ekonomi daerah, dan perkembangan teknologi informasi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, upah minimum provinsi, produk domestik regional bruto, dan indeks pembangunan teknologi dan informasi memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai hubungan antara UMP, PDRB, dan IPTIK terhadap IPM di Indonesia. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian untuk pengaruh UMP, PDRB, dan IPTIK terhadap IPM di Kawasan Timur periode 2019-2023.

1.3.Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan peneliti di atas, disimpulkan bahwa pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi terhadap indeks pembangunan manusia?
2. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto terhadap indeks pembangunan manusia?
3. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi terhadap indeks pembangunan manusia?

1.4.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum provinsi terhadap indeks pembangunan manusia
2. Untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto terhadap indeks pembangunan manusia
3. Untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi terhadap indeks pembangunan manusia

1.5.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil atau temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan bagi pembaca khususnya yang berkaitan dengan upah minimum provinsi, produk domestik regional bruto, dan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi terhadap indeks pembangunan manusia.

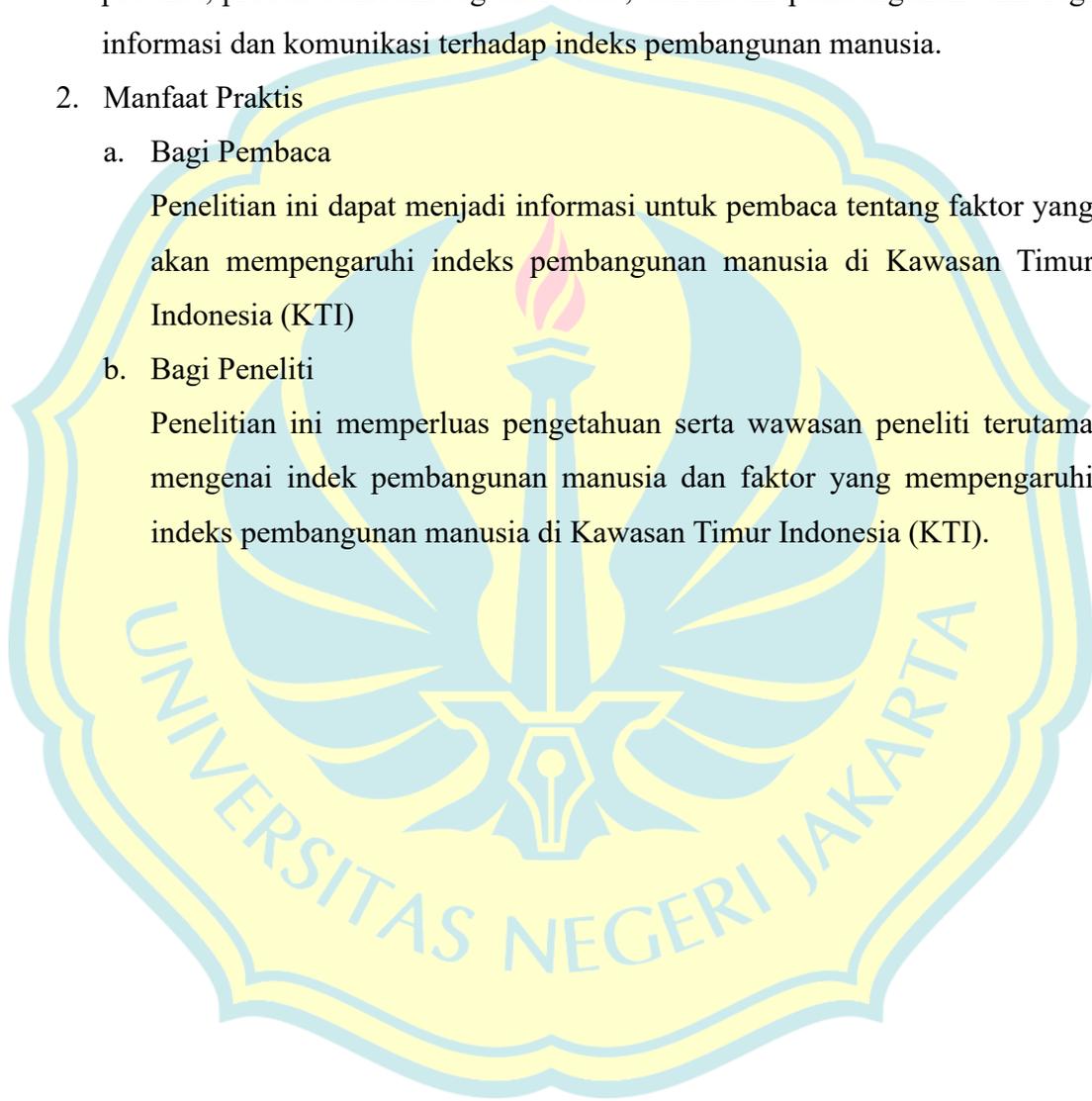
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi informasi untuk pembaca tentang faktor yang akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kawasan Timur Indonesia (KTI)

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini memperluas pengetahuan serta wawasan peneliti terutama mengenai indeks pembangunan manusia dan faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kawasan Timur Indonesia (KTI).



Intelligentia - Dignitas